

POLITICAL PARTICIPATION



LAPORAN PENELITIAN
DOSEN MUDA TAHUN ANGGARAN 2002

KKB

KK - 2B

341.247.3

Soe

t

TANTANGAN DAN MASA DEPAN ASEAN DALAM MEMELIHARA REJIM KEAMANAN REGIONAL

Oleh:

Dra. SARTIKA SOESILOWATI, MA.
Drs. I. BASIS SUSILO, M.A., MPH



3000132033141

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

DIP Nomor : 003/XXIII/1/--/2002 Tanggal 1 Januari 2002

Kontrak Nomor : 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002

Ditjen Dikti, Depdiknas

Nomor Urut : 59

10/10/02
10

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

September, 2002



LEMBAGA PENELITIAN

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722) | 10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga | |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi | |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

3000132033141

IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. a. Judul Penelitian | : Tantangan ASEAN dalam Memelihara Rejim Keamanan Regional |
| b. Macam penelitian | : Penelitian Dosen Muda |
| 2. Kepala Proyek Penelitian | |
| a. Nama lengkap dan Gelar | : Dra Sartika Soesilowati M.A |
| b. Jenis kelamin | : Perempuan |
| c. Pangkat/golongan dan NIP | : Penata Muda Tk I /III B |
| d. Jabatan Sekarang | : Asisten Ahli |
| e. Fakultas/Puslit/Jurusan | : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Jurusan Hubungan Internasional |
| f. Univ/Ins/ Akademi | : Universitas Airlangga |
| g. Bidang Ilmu yang diteliti | : Ilmu Hubungan Internasional |
| 3. Jumlah Tim peneliti | : 2 orang |
| 4. Lokasi Penelitian | : Jakarta, Surabaya |
| 5. Kerjasama dengan Instansi lain | |
| a. Nama Instansi | : - |
| b. Alamat | : - |
| 6. Jangka waktu Penelitian | : 5 Bulan |
| 7. Biaya yang diperlukan | : Rp.6.000.000,00 |

Surabaya, 29 September 2002

Mengetahui :
Dekan Fak/Puslit :

Prof. Dr. Drs. Hotman Siahaan
NIP 130701134

Ketua Peneliti

Dra Sartika Soesilowati M.A
NIP 132 134 681



Menyetujui :
Ketua Lembaga Penelitian Unair,

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
NIP 130 701 125



DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iv - vi
SUMMARY	vii - ix
KATA PENGANTAR	x
I. PENDAHULUAN	1 - 3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4 - 11
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	12
IV. METODE PENELITIAN	13
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	14 - 30
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	31 - 33
DAFTAR PUSTAKA	34 - 36
LAMPIRAN	

RINGKASAN

**TANTANGAN ASEAN DALAM MEMELIHARA
REJIM KEAMANAN REGIONAL***(Sartika Soesilowati dan I. Basis Susilo, 2002, 36 hal.)*

ASEAN saat ini tengah menghadapi tantangan dari dalam dan luar organisasi yang mengancam kredibilitas internasionalnya dan melemahkan kesatuan dan kekompakan organisasi. Contohnya, ASEAN tidak mampu mengembangkan suatu respon bersama yang efektif dalam menanggulangi krisis keuangan Asia juga tidak berdaya dalam menangani masalah asap yang diakibatkan kebakaran hutan Indonesia tahun 1997-1998 dan menyebabkan kerugian materi, kesehatan dan psikologis bagi negara-negara yang terkena dampak kebakaran hutan tersebut. Yang lebih penting lagi adalah, ASEAN tidak mampu untuk melakukan langkah kongkrit untuk menanggulangi dampak konflik yang disebabkan oleh kebijakan internal di Myanmar, Kamboja, Indonesia dan Philipina. Kekacauan dan ketidakstabilan ekonomi dan politik dengan masih berlangsungnya krisis keuangan yang terjadi di dua negara pendiri ASEAN, Indonesia dan Philipina, juga proses demokratisasi di Indonesia yang tidak segera menciptakan stabilitas nasional telah semakin mempertegas menurunnya kredibilitas ASEAN. Organisasi ini tidak mempunyai kapabilitas untuk turut campur dalam masalah dalam negeri untuk mengurangi dampak konflik horisontal dan vertikal di Indonesia. Saat inipun netralitas ASEAN juga dipertanyakan berkaitan dengan isu terorisme. Amerika Serikat telah memasukkan negara-negara Asia Tenggara dalam prioritas kepentingannya guna melawan jaringan terorisme internasional. Akibatnya, pemerintah Amerika Serikat berupaya terlibat secara intens dalam masalah dalam negeri negara Asia Tenggara untuk menangani terorisme tersebut. Kebijakan Amerika Serikat ini telah menimbulkan ketegangan diantara anggota ASEAN yang pada gilirannya melemahkan kesatuan dan kekompakan ASEAN.

Situasi dan kondisi diatas menimbulkan dua pertanyaan : *Pertama*, faktor-faktor inheren (didalam organisasi) apa saja yang menyebabkan ASEAN dewasa ini kurang berpengaruh dalam menciptakan kestabilan kawasan? Seberapa jauh faktor-faktor tersebut

berpengaruh terhadap menurunnya kredibilitas organisasi dalam penanganan konflik dan ketegangan diantara anggota ASEAN dan non anggota ? *Kedua*, bagaimana ASEAN harus melakukan perubahan, improvisasi faktor-faktor inheren yang tidak lagi relevan dalam memelihara kesatuan dan kredibilitas asosiasi serta upaya penyelesaian konflik demi penguatan organisasi.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkapkan faktor-faktor inheren organisasi yang telah menyebabkan kemunduran dan ketidakmampuan organisasi dalam melaksanakan fungsinya untuk menciptakan stabilitas keamanan di Asia Tenggara. Disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan dan alternatif guna menguatkan peranan organisasi dengan melakukan improvisasi dan perubahan mekanisme dan norma-norma yang ada dalam organisasi.

Pembahasan untuk menjelaskan tantangan dan prospek ASEAN ini akan diuraikan melalui : *pertama*, melakukan identifikasi dan kategorisasi karakteristik-karakteristik yang utama dari organisasi ASEAN khususnya berkaitan dengan integrasi organisasi dan upaya penanganan konflik; *kemudian* mengkaji tantangan, tekanan yang dihadapi berkaitan dengan karakteristik yang dimilikinya tersebut sehubungan dengan perubahan perubahan kontemporer yang terjadi di dunia internasional dan dinamika domestik; *terakhir*, akan diambil suatu kesimpulan seberapa jauh nilai-nilai, norma-norma dan mekanisme dalam ASEAN perlu dirubah atau dikembangkan guna menghadapi tantangan tsb dan meningkatkan kredibilitas organisasi serta menciptakan kestabilan kawasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme dan norma-norma organisasi ASEAN tidak memungkinkan ASEAN secara organisasional mempunyai peranan yang maksimal dalam upaya mengatasi konflik di tingkat regional. Mekanisme hubungan yang bersifat *intergovernmentalis* yang sempit menjelaskan bahwa sesungguhnya kredibilitas ASEAN tergantung pada kredibilitas individu negara bukan organisasi. ASEAN masih menggunakan strategi konvensional seperti *assurance*, *common perception*, *regional building* dalam mengelola dinamika hubungan antar anggota. Yang lebih penting lagi norma budaya keamanan seperti *non intervention* dan *ASEAN way* yang menjadi prinsip dasar dari ASEAN tidak lagi relevan sebagai suatu alat atau pedoman untuk

menyelesaikan masalah regional. Mekanisme dan norma-norma tersebut telah menciptakan suatu ketegangan yang tinggi diantara anggota ASEAN saat ini, sekaligus menghadapi tantangan dari pihak non anggota dan perbedaan kepentingan nasional.

Masa depan ASEAN, akan tergantung pada kemampuan dan tekad anggota asosiasi untuk menguatkan organisasi. Diperlukan suatu upaya bersama guna melakukan pengembangan dan improvisasi dari mekanisme, strategi dan norma-norma keamanan yang konvensional. Salah satu syarat yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan perubahan mekanisme, strategi dan norma-norma tersebut adalah diperlukan suatu pendekatan yang secara simultan akan dapat mengakomodasi : kepentingan nasional anggota, tuntutan pihak di luar ASEAN semacam perluasan demokratisasi dan hak-hak azazi manusia, serta *borderless security*, serta menguatkan kohesi anggota ASEAN dalam menangani masalah di dalam ASEAN.

(Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga, DIP Nomor : 003/XXIII/1--2002 Tanggal 1 Januari 2002, Kontrak Nomor : 023/LIT/BPPK-SDM/2002, Ditjen Dikti, Depdiknas)

SUMMARY

PROBLEMS OF ASEAN FOR MAINTAINING A REGIONAL SECURITY REGIME

(Sartika Soesilowati, I. Basis Susilo, 2002, 36 pages)

ASEAN has been beset with internal and external problems that threaten to tarnish its international credibility and undermine its unity and cohesion. ASEAN has not managed to develop an effective and concerted response to the Asian financial crisis nor to the environmental hazard caused by Indonesia's forest fires. Perhaps more significantly, ASEAN has been unable to fashion a response to the regional spillover effects caused by the internal policies of Myanmar, Cambodia and East Timor. The current disturbances in economic and politics particularly the ongoing Asian financial crisis in Indonesia and Philippines, also Indonesian democratization process is exacerbating this decline in association's standing. This organization does not have capability to interfere in the domestic matters in order to eliminate horizontal and vertical conflict in Indonesia. Recently, the neutrality of ASEAN has also been questioned by its policy in dealing with terrorism issue. The United States has included the South East Asia countries in her priority to combat international terrorism. Consequently, the US has been deeply involved in combating terrorism in domestic arena. The US policies has also created tension among the member. Those phenomena have challenged the unity and cohesion of ASEAN.

This situation raises two main questions: *First*, what are the inherent factors that are influencing to reduce the ASEAN capability to create stability in the region? and to what extent are those elements responsible for contributing to the decrease of ASEAN's credibility in dealing with conflict and tension among the ASEAN members and non members?; *Second*, what are the future prospects of ASEAN in maintaining the cohesiveness and credibility of the association?, and what are some changing improvements should be done to eliminate the tension and instability region and to strengthen the organization?

This research has two aims: First, to explain the inherent elements in organization which are hampered to develop the maximal capability of organization to solve the conflict and to build stability in South East Asia. Second, to offer some alternatives to strengthen the role of organization through some development of its mechanism and norms.

These analyses and assumption will be explained through : *first* identifying the main characteristics of ASEAN, primarily in integration of organization and an effort to resolve the conflict; *then* it will examine the challenge, pressures to the characteristics caused by the contemporary changing in international arena and domestic level, finally, it will draw implications of the decreasing role of ASEAN and suggest alternative assessments that may help ASEAN to play a more role in maintaining its regional security regime.

This research argues that since the thirtieth anniversary in July 1997, ASEAN has lost international prestige and has only had a marginal role in Southeast Asian affairs for several reasons. *First*, ASEAN can not develop its maximal role to resolve the regional problems and conflict because of the limited and conventional of inherent mechanism and norms of security. The style of regional relations is based mainly *state to state cooperation or narrow intergovernmental* which are contributing to the strong dependence of the organization to the state clearly explained the tendency that credibility of ASEAN depend on the state not to the organization. ASEAN is still using the conventional strategies and mechanism like assurance, regional building, and common perception to solve regional problems. More significantly, ASEAN's decreasing prestige is mostly caused by the limitations of non-interference norm and ASEAN way which have hindered ASEAN's ability directly in addressing the various conflicts and problems. Therefore, the mechanisms and norms have created high tension and received challenged from external pressures and divergences of national interest.

The future of ASEAN, therefore, will depend on the capability of the association's members to show cohesiveness and solidarity to improve the mechanism, strategies and norms of organization. Second, ASEAN's prospects also depends on the development of

an approach which can simultaneously accommodate the national interest of its members and external demand for enhancing democratization, human rights, borderless security and continuing cohesiveness among the members states to address problems within ASEAN.

(Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, University of Airlangga, DIP No. : 003/XXIII/1--2002, 1 January 2002, Contract No. : 023/LIT/BPPK-SDM/2002, Ditjen Dikti, Depdiknas)

KATA PENGANTAR

ASEAN adalah organisasi yang eksistensinya sangat penting bagi kawasan Asia Tenggara. Melalui organisasi ini, negara-negara Asia Tenggara melakukan komunikasi, melancarkan hubungan bertetangga dan kerjasama, menciptakan order untuk mencegah konflik dan sekaligus memberikan posisi tawar menawar yang lebih baik dalam berurusan dengan pihak luar. Adalah tidak terbayangkan apabila kawasan Asia Tenggara tidak memiliki organisasi regional seperti ASEAN. Bagaimana negara-negara di kawasan ini meredakan kecurigaan dan mencegah konflik terbuka terjadi diantara negara-negara ASEAN yang potensial berkonflik ?

Bagi Indonesia, eksistensi ASEAN adalah sangat penting. ASEAN merupakan salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia. Melalui ASEAN potensi kepemimpinan Indonesia sebagai *major power* di kawasan Asia Tenggara tidak dapat dielakkan. Peranan Indonesia sangat penting dalam membentuk perilaku dan image organisasi. Luas dan strategisnya posisi geografis Indonesia, ditunjang dengan jumlah penduduk yang besar, sejarah kolonialisme dan ekspansionisme serta kondisi sosial dan politik akan sangat berpengaruh terhadap *performance* ASEAN.

Menurunnya kredibilitas dan kohesi ASEAN saat ini menarik untuk dikaji. Seberapa jauh sesungguhnya peranan ASEAN memudar? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya ? Tantangan apa yang dihadapi oleh ASEAN dewasa ini ? Seberapa jauh dinamika internasional dan domestik berpengaruh terhadap peranan ASEAN ? Bagaimana sikap, kebijakan yang harus dilakukan oleh ASEAN untuk memperbaiki situasi ? Semua pertanyaan-pertanyaan tersebut menarik untuk dikaji. Apalagi selaku pengajar mata kuliah Masyarakat Bangsa dan Politik Asia Tenggara, kami dituntut untuk selalu mengamati perkembangan yang ada di Asia Tenggara dan mencari jawaban dan analisa dari dinamika ASEAN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Association of Southeast Asian Countries (ASEAN) atau organisasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara, yang didirikan pada tahun 1967, saat ini sedang menghadapi tantangan dan kendala dalam mempertahankan kesatuan dan solidaritasnya. Terdapat kecenderungan memudarnya kredibilitas di panggung internasional. Fenomena ini nampaknya kebalikan dari apa yang selama ini diasumsikan tentang keberhasilan ASEAN sebagai: organisasi regional yang berhasil tetap eksis ketika banyak organisasi regional lain tumbang; mampu menjembatani keanekaragaman di kawasan ini; dan pada beberapa kasus berhasil mendorong terciptanya perdamaian dan hubungan baik antar negara ASEAN yang sebelum didirikannya dilanda konflik dan kecurigaan antar negara. Pada periode sebelum krisis keuangan Asia tahun 1997, ASEAN diakui menjadi alat yang terinstitusionalisasi untuk mengelola konflik *intra mural* (Leifer dalam Acharya 1997:20 dan Wanandi 2000). Tidak ada konflik dan krisis yang signifikan timbul diantara anggota ASEAN. Jadi, ada persepsi yang berbeda tentang peranan ASEAN saat ini, yang berbanding terbalik dengan prestasi yang pernah diraih oleh ASEAN pada masa sebelumnya.

ASEAN menghadapi kendala hubungan di dalam maupun keluar. Salah satu contohnya adalah ASEAN tidak mampu untuk mengembangkan suatu respons yang efektif secara bersama dalam menanggulangi krisis keuangan Asia yang di mulai tahun 1997. Sampai saat ini negara-negara ASEAN belum pulih dari krisis tersebut. Bahkan pada beberapa negara seperti Indonesia dan Philipina, krisis tersebut tidak hanya memperpuruk perekonomian nasional tapi juga menggoyahkan stabilitas sosial, politik dan keamanan.

Integritas, kredibilitas ASEAN juga mulai diragukan ketika ASEAN dianggap memberikan reaksi yang lambat untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kasus insiden kebakaran hutan di Indonesia tahun 1997 - 1998. ASEAN tidak mampu bertindak secara komprehensif dalam menanggulangi dampak kerusakan yang ditinggalkan dari kebakaran hutan dalam jangka pendek dan panjang. Insiden kebakaran



ini menjadi isu yang sensitif antar pejabat tinggi ASEAN, khususnya antara pejabat tinggi Indonesia dan negara-negara ASEAN lain yang biasanya cukup santun dan tidak secara terbuka menyuarakan kekecewaannya pada negara lain. ASEAN juga tidak mampu melakukan suatu respon terhadap dampak yang meluas dari konflik internal di negara-negara ASEAN. Tidak ada langkah konkrit dalam membantu penyelesaian persoalan dalam negeri terkait dengan pelanggaran HAM di Myanmar, Malaysia, Indonesia yang telah menjadi perhatian dunia. ASEAN juga tidak melakukan upaya yang signifikan dalam membantu pemerintah Indonesia menanggulangi masalah disintegrasi bangsa.

Perubahan kebijakan Amerika Serikat terhadap negara-negara di Asia Tenggara pasca 11 September 2001, bahkan semakin memperlihatkan ketidak kompakn ASEAN. Amerika Serikat menempatkan ASEAN sebagai agenda utama berkaitan dengan upaya pembasmian teroris di Asia Tenggara yang disinyalir mempunyai basis yang kuat terutama di negara-negara Islam moderat seperti Indonesia dan Malaysia. Menurut Lee Kim Chew (*The Jakarta Post*, April 2002) ASEAN meraih '*a new significance in the US strategic horizon*'. Amerika Serikat bahkan telah meminta Vietnam untuk menggunakan bekas pangkalan laut Cam Ranh Bay yang telah ditinggalkan Rusia. Bila ini diluluskan, maka akan menunjukkan ketidak relevan ASEAN dengan semangat ZOPFAN (*Zone of Freedom, Peace and Neutrality*). Kemudian, terjadi konflik dan saling kecam secara terbuka terhadap negara lain khususnya ditujukan kepada Indonesia berkaitan dengan isu terorisme. Menteri Senior Singapura, Lee Kuan Yew mengkritik bahwa perang terhadap terorisme di Indonesia belum sesuai dengan yang diharapkan (*Koran Tempo*, April 2002). Terdapat sikap dan kebijakan yang *incompatible* diantara pemimpin ASEAN tentang isu teroris yang semakin menunjukkan menurunnya solidaritas ASEAN.

B. Permasalahan

Dewasa ini terdapat suatu fenomena bahwa kredibilitas, kesolidan, fungsi dan peran ASEAN dipertanyakan dalam menciptakan stabilitas kawasan. ASEAN dianggap tidak mampu berperan sebagai organisasi regional yang dapat menyelesaikan konflik dan menjamin stabilitas kawasan. Permasalahan yang lalu relevan untuk dikaji adalah :

Pertama, faktor-faktor inheren (didalam organisasi) apa saja yang menyebabkan fungsi, peran, kohesi dan kredibilitas ASEAN menurun dalam menciptakan kestabilan

kawasan? Seberapa jauh faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap menurunnya kredibilitas organisasi dalam penanganan konflik dan ketegangan diantara anggota ASEAN dan non anggota ?

Kedua, bagaimana ASEAN harus melakukan perubahan dan improvisasi faktor-faktor inheren yang tidak lagi relevan dalam memelihara kesatuan dan menunjang kredibilitas asosiasi serta upaya penyelesaian konflik?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori Regionalisme Secara Umum

A.1. Definisi dan Ruang Lingkup

Regionalisme dapat didefinisikan sebagai kerjasama diantara pemerintahan atau organisasi non pemerintahan dari lebih tiga negara yang mempunyai kedekatan geografis dan *interdependence* untuk meraih keuntungan bersama dalam satu atau beberapa isu (Alagappa 1995 :362). Perincian tentang elemen elemen kunci dari definisi diatas sebagai berikut : *Pertama* adalah berkaitan dengan pengertian kerjasama. Kerjasama dilakukan untuk meraih tujuan bersama yang didasari atas pertimbangan bahwa dengan melakukan kerjasama akan lebih diuntungkan daripada bertindak sendiri. Meskipun tidak setiap kerjasama harus menghasilkan suatu perolehan keuntungan yang sama bagi seluruhnya.

Kedua adalah masalah kedekatan geografi. Spesifikasi tentang kedekatan geografi dalam kerjasama regional menjelaskan suatu konstruksi analitis yang sesungguhnya tidak beranjak dari pengertian umum tentang pengertian dan praktek-praktek regionalisme yang sudah ada. Contohnya hampir semua organisasi regional menggunakan identitas geografi seperti : *North Atlantic Treaty organization (NATO)*, *Economic Cooperation of West African States (ECOWAS)*, *Gulf Cooperation Council (GCC)*. Spesifikasi geografi ini juga untuk membedakan regionalisme dari semacam institusi multilateral semacam *Commenwealth of Nations* dan *the Organization of the Islamic Conference (OIC)*. Namun kedekatan geografi saja tidak cukup untuk menjelaskan kerjasama regional. Kepentingan dari negara-negara yang berpartisipasi dalam kerjasama ini harus interdependensi. Kecenderungan yang ada menunjukkan ketergantungan keamanan biasanya tinggi diantara negara-negara yang memiliki kedekatan geografi. Konflik antar negara umumnya terjadi diantara negara yang berbatasan wilayah dari pada negara - negara yang terpisah jauh.

Ketiga adalah masalah jumlah keanggotaan. Sebagaimana layaknya suatu institusi multilateral, regionalisme membutuhkan partisipasi minimum tiga negara. Tidak ada pembatasan maksimal jumlah anggota secara teoritis, tapi dua kriteria yaitu : interdependensi (kedekatan dan persamaan seperti sejarah, budaya dan persepsi

keamanan) dan pengakuan internasional tentang perbedaan wilayah, berguna untuk menentukan keanggotaan dan batas regionalisasi. Berdasarkan kriteria interdependensi, regionalisasi dalam masalah keamanan meliputi negara-negara yang memiliki perhatian keamanan yang saling berhubungan dan tidak dapat menangani secara isolasi dari negara lain atau keamanan suatu negara bergantung pada negara lain. Barry Buzan (dalam Job 1997:2) menyebutnya sebagai *Regional Security Complex*. Dalam pengertian ini, hubungan *amity* dan *enmity* (persahabatan dan permusuhan) adalah terikat secara kuat antar negara. Jadi suatu wilayah regional tidak hanya mencakup negara-negara yang mempunyai hubungan yang positif (*like*) tapi juga negara yang dianggap sebagai *non-likeminded* dan menjadi ancaman keamanan bagi satu atau lebih negara dalam suatu sistem.

Keempat adalah berkaitan dengan isu kerjasama. Isu dari kerjasama regional ini dapat berupa isu yang spesifik seperti : *a collective self defence arrangement (alliance)* (pertahanan nasional bersama) yang dimaksudkan untuk melawan ancaman pihak luar yang spesifik; *a collective security arrangement* (keamanan bersama) untuk memelihara order diantara anggotanya (Alagappa 1995 :363). Kerjasama ini juga dapat meliputi beberapa isu seperti ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Suatu organisasi regional yang meliputi berbagai isu disebut sebagai *comprehensive security* (Dewitt, 1994 :1-4). Isu keamanan terkait langsung dengan masalah ekonomi, sosial dan budaya. Bahwa kesenjangan sosial akan mengganggu stabilitas nasional, kelangsungan kedaulatan rejim nasional, dan potensial menciptakan instabilitas regional. Keamanan regional tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan keamanan nasional demikian juga sebaliknya.

A.2. Interaksi Organisasi.

Keefektifan kerjasama regional sesungguhnya dapat diprediksi dari pengamatan proses integrasi negara dalam kerjasama regional. Mattli Walter (1999:20-40) membedakan proses integrasi tersebut dalam : *Functionalism, Neofunctionalism dan Intergovernmentalism*. Tipe *functionalism* dimotori oleh pemikiran David Mitrany (dalam Walter 1999: 21) yang menyatakan dalam esaynya *A Working Peace System* '... bahwa masalah kita adalah tidak menjaga bangsa-bangsa terpisah secara damai, tapi bagaimana membawa mereka secara aktif bersatu...'. Metode fungsional mengutamakan

proses yang gradual dalam evolusi kerjasama regional yang ditujukan kearah perdamaian dan kemakmuran. Aspek fundamental dari fungsionalisme adalah bahwa integrasi negara atau bangsa dalam kerjasama regional tidak dapat ditransfer secara efektif melalui suatu formula, melainkan harus melalui suatu fungsi. Ini yang disebut dengan '*peace by pieces*'. Lebih jauh, *Neofunctionalism* menggambarkan suatu proses dimana aktor-aktor politik dengan latar belakang nasional yang berbeda memindahkan loyalitas, harapan, dan aktivitas politik kearah pusat yang lebih baru dan lebih besar, dimana institusi memiliki yuridiksi atas negara yang ada. Dalam *neofunctionalism*, maka aktor utama yang berperan dalam proses integrasi adalah aktor dibawah negara dan diatas negara. Aktor-aktor dibawah negara ini termasuk kelompok kepentingan dan partai politik. Sedangkan aktor aktor diatas negara adalah institusi regional supranational. Aktor-aktor ini yang akan mempromosikan integrasi, mempercepat perkembangan kelompok kepentingan menjalin hubungan dengan para teknokrat dalam birokrasi. *Intergovernmentalism* sangat berbeda dengan kedua pendekatan yang terdahulu tersebut. Pendekatan kerjasama *Intergovernmentalis* mengkonsentrasikan proses perkembangan asosiasi yang bertumpu pada otoritas negara dan bukan hal-hal yang bersifat natural. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerjasama antar pemerintah dan dimotivasi oleh kepentingan nasional. *Sovereignty* (kedaulatan nasional) adalah suatu prinsip yang sangat penting dari suatu kerjasama regional menurut pendekatan ini.

A.3. Strategi dan Manajemen Konflik

Regionalisme mempunyai potensi untuk memfasilitasi komunikasi, sosialisasi, pertukaran informasi, dan melakukan aksi kolektif. Organisasi regional mempunyai potensi untuk : memfasilitasi interaksi sesuai dengan aturan yang disepakati, menyelesaikan masalah kawasan, mengembangkan serangkaian nilai-nilai bersama, atau meningkatkan *power* dan pengaruh bersama *vis a vis* aktor lain. Karena potensi-potensi yang dimiliki oleh regionalisme, maka organisasi regional diharapkan mampu untuk melakukan beberapa strategi semacam : *assurance, community building, deterrence, non intervention, isolation, intermediation, intervention dan internalization* (Alagappa 1995:369).

Strategi *assurance* dapat meningkatkan transparansi, mengurangi ketidakpastian, membatasi dan mengatur kompetisi, dan oleh karenanya membantu terbentuknya *confidence* dan menghindari pecahnya dan peningkatan kekerasan. Tujuan dari strategi *assurance* adalah mengurangi *security dilemma*. *Deterrence strategies* - yaitu meliputi *collective security* (keamanan bersama) dan *collective defence* (pertahanan bersama) - untuk menangkal tingkah laku agresif dari anggota maupun bukan anggota. *Collective defence* adalah bentuk seperti *Nato* dan Pakta Warsawa berdasarkan pada identitas ancaman bersama adalah yang paling sesuai dalam menangani agresi pihak luar. *Non intervensi* adalah suatu strategi untuk tidak terlibat dalam konflik khusus atau domestik. Sedangkan *Isolation*, meski dekat pengertian dengan *non intervention*, adalah untuk menjaga dampak secara geografis meluasnya konflik akibat keterlibatannya dengan pihak lain. Intervensi merujuk pada keterlibatan secara aktif dan langsung melalui penggunaan sumber-sumber kolektif ekonomi, politik dan militer suatu organisasi regional untuk meredakan dan mencegah terjadinya konflik. Intervensi dapat dilakukan menggunakan *collective security* dan *collective defence* atau menjaga perdamaian diantara kelompok yang berseteru.

Intermediation dan *internationalization* adalah dua strategi yang ada untuk meredakan konflik. Intermediasi adalah biasanya non partisan dan pendekatan tanpa kekerasan untuk mengakhiri konflik. Strategi *internazionalization* menjadi relevan ketika konflik *prevention*, *containment* dan *termination* adalah diluar kemampuan kesepakatan regional. Melalui internasionalisasi, organisasi regional dapat memobilisasi sumber-sumber dari aktor-aktor dan organisasi diluar dalam mendukung strategi mereka.

Terkait dengan kategorisasi manajemen konflik, maka terdapat tiga level manajemen konflik yaitu : *intra mural conflict*, *extra mural conflict management* dan *domestic conflict management* (Alagappa 1995: 371-383). *Intra mural level*, yaitu upaya manajemen konflik diantara anggota organisasi regional contohnya adalah upaya untuk mengurangi instabilitas yang diakibatkan *security dilemma* diantara anggota. *Extra mural level* adalah upaya manajemen konflik berupa perlindungan anggota dari instabilitas oleh pihak luar anggota dan organisasi. *Domestic conflict management* adalah manajemen konflik untuk mencegah instabilitas di dalam negeri suatu negara.

A.4. Budaya Keamanan

Definisi yang disepakati tentang *security culture* adalah ;

Culture, as it refers to non - ... security building issues, consists of those enduring and widely the ways in which a state/society's interest and values with respect to security, stability and peace are perceived, articulated and advanced by political actors and elites.(Krausse 1997:13).

Aspek-aspek *securitry culture* (budaya keamanan) mempunyai pengaruh yang penting pada perilaku organisasi kerjasama keamanan regional. Sebagaimana Elizabeth Kier (dalam Krause,1997:2) menyebutkan bahwa '...budaya adalah penting dalam menerangkan pilihan-pilihan (misalnya) antara doktrin militer yang ofensif dan yang defensif. Meski pembahasan tentang pengaruh elemen budaya keamanan dalam organisasi kerjasama regional tidak mutlak, karena elemen materi, dan perhitungan rasional seringkali menjadi alasan bagi *regional architecture*. Namun, adalah penting untuk mengerti bagaimana nilai-nilai normatif ini membentuk konsep, kepentingan dan identitas para aktor. Terdapat suatu konsensus bahwa 'budaya' memainkan peranan penting dalam membentuk tingkah laku politik internasional dan prospek bagi pembangunan keamanan dalam era setelah Perang Dingin berakhir.

A.5. Norma Keamanan

Norma didefinisikan sebagai a 'standard of behavior defined in term right of and obligation' (Krasner 1982: 186). Norma ini memfasilitasi dan menentukan karakteristik dari bentuk kerjasama dan perhitungan-perhitungan akan harapan di masa dimasa depan. Norma adalah suatu yang krusial dalam menentukan tingkah laku organisasi. Norma dalam hal ini merujuk pada '*collective expectationfor the proper behavior of actors within a given identity*' jadi ada tingkah laku sama yang diharapkan dari aktor-aktor dalam suatu kelompok. Katzenstein (dalam Job 1997:3) membaginya dalam : (a) *regulative norms*: yaitu norma yang menentukan standard tingkah laku; (b) *constitutive norms* : yaitu norma yang menentukan identitas aktor; (c) *practical norms* yaitu norma yang meperhatikan penerimaan tingkah laku dan kebiasaan terbaik dan (d) *evaluative norms* yaitu yang mengembangkan prinsip-prinsip normatif. Berbagai macam norma ini bisa dilakukan.

A.6. Fase Ideal Kerjasama Regional : Security Community

Fungsi dan fase pencapaian yang paling tinggi dari kerjasama regional yang saat ini dijadikan suatu acuan adalah seperti yang di gambarkan oleh Karl Deutsch sebagai *security community*. Tahap ini merujuk pada penjelasan perkembangan kerjasama diantara negara-negara di Atlantik Utara. Pengertian *Security community* adalah :

'a group that has become integrated, where integration is defined as the attainment of sense of community, accompanied by formal or informal institutions or practices, sufficiently strong and widespread to assure peaceful change among members of a group with 'reasonable' certainty over a long period of time' (Acharya 1997:1)

Dalam *security community* terdapat suatu kepastian bahwa anggota komunitas tidak akan berperang atau bertikai secara fisik tapi akan menyelesaikan pertikaian dalam cara-cara damai.

Terbentuknya tahap kerjasama regional dalam fase *security communities* membutuhkan suatu nilai demokrasi liberal dengan menekankan pada pentingnya interdependensi ekonomi dan pluralisme politik. Ide Kantian tentang *democratic peace* menjadi basis filosofi konsep *security communities*. Dalam pandangan ini, suatu *security community* adalah sesungguhnya masyarakat keamanan demokratis.

Mengingat hambatan pencapaian tahap *security communities*, seperti yang ditunjukkan dengan fenomena yang ada di negara berkembang dalam masalah demokrasi, hak-hak azazi manusia dan pelaksanaan pluralisme politik, maka Adler dan Barnett (Acharya 1997: 4-6) memodifikasi tahap *security communities*. Mereka mengidentifikasi tiga langkah dalam pembangunan semacam komunitas yaitu *nascent*, *ascendant*, dan *mature*. Masing-masing fase ditandai oleh sejumlah karakteristik. Fase *nascent* terdiri sejumlah *'triggering mechanisms'* termasuk membentuk persepsi bersama, keuntungan perdagangan yang diharapkan dan *sharing identitas*. Fase *ascendant* ditandai oleh koordinasi militer yang lebih kuat, berkurangnya ketakutan antar anggota, dan mulainya transisi kognitif dan identitas kelompok 'yang mulai mendorong harapan yang saling bergantung terhadap perubahan yang lebih damai'. Karakteristik dari fase yang *mature* adalah institusionalisasi yang lebih luas, supranasionalism, kepercayaan yang tinggi dan rendahnya konflik dan kemungkinan konflik militer.

B. Tinjauan Pustaka Regionalisme di Asia Tenggara

Sejauh ini telah banyak studi-studi yang membahas tentang ASEAN, tetapi pembahasan tentang melemahnya peran dan kredibilitas ASEAN beserta sebab-sebabnya baru dibahas secara intensif pada empat tahun terakhir. Inipun belum memberikan jawaban yang komprehensif untuk dapat memperbaiki kinerja dan reputasi asosiasi.

Beberapa peneliti berpendapat bahwa menurunnya peranan dan kredibilitas ASEAN adalah akibat langsung dari kekacauan ekonomi diantara negara-negara ASEAN yang telah melemahkan asosiasi. Berlanjutnya krisis ekonomi telah menjadi semacam faktor yang menghambat upaya pertumbuhan institusi dan peranannya dalam menunjang keamanan regional. Sebab utama adalah bahwa ketegasan dan kemandirian ASEAN yang sempat dilakukan pada sepuluh tahun terakhir sebelum ulangtahunnya ke tiga puluh adalah didasarkan pada kepercayaan diri terhadap kesuksesan dalam bidang ekonomi masing-masing negara ASEAN. Ekonomi adalah semacam sesuatu yang menciptakan kepercayaan diri. Tanpa insentif keuangan yang menggerakkan diplomasinya, ASEAN akan kehilangan banyak pengaruh internasional (Narine 1999:370). Krisis ekonomi ASEAN juga telah meninggalkan dampak bahwa pemimpin-pemimpin ASEAN menjadi kurang argan ketika mendiskusikan masalah hak azazi manusia yang menjadi sorotan dan kecaman pihak internasional (Linther 1999, h.,27). Meskipun ASEAN membuat sedikit kontribusi terhadap kesuksesan ekonomi dari anggota-anggotanya, namun ada harapan yang tinggi digantungkan terhadap asosiasi untuk secara efektif melakukan respon terhadap krisis yang ada (Narine 1999:h.371)

Masalah berikutnya adalah kekacauan politik dalam negeri, khususnya di Indonesia. Turunnya Suharto secara tidak langsung mempengaruhi manajemen konflik ASEAN. Bagi ASEAN turunnya Suharto diibaratkan bagaikan bom yang mengejutkan, karena Suharto meski tidak secara terbuka mengklaim peranan kepemimpinannya dalam ASEAN, Suharto *'set the tone for the rest of ASEAN'* (*The Economist* 1998, 6 Juni). Pergantian pimpinan selanjutnya terhadap Habibi dan Abdurrahman Wahid tidak dapat menggantikan posisi Suharto sebagai salah satu tokoh kunci dalam ASEAN. Juga, pengaruh Indonesia berakar dari banyak sumber daya, termasuk luasnya negara, dan besarnya populasi. Konfrontasi yang berkelanjutan akan dirasakan sebagai intimidasi bagi negara-negara teangganya seperti pada masa lalu.

Kemudian beberapa peneliti juga menyebutkan bahwa penyebab utama yang menyebabkan ASEAN tidak mampu melakukan respon yang efektif sesungguhnya terletak pada norma yang ada dalam ASEAN. Prinsip-prinsip non intervensi dianggap faktor yang krusial dalam menghambat kemampuan ASEAN secara langsung untuk ikut serta menangani berbagai macam konflik dan masalah yang melanda kawasan ini (Narine, 1999; Henderson 1999).

Studi-studi yang terdahulu tentang ASEAN tidak banyak mempermasalahkan norma. Bahkan sebaliknya beberapa penelitian beranggapan bahwa justru norma non intervensi disebut sebagai faktor utama yang mendorong keberhasilan ASEAN selama tiga puluh tahun dalam mengorganisasikan kampanye untuk mengisolasi Vietnam (Arcarya 1997). Juga norma non intervensi dianggap berhasil dalam mencegah konflik antar beberapa negara ASEAN, sehingga sampai pada pemikiran adalah tidak mungkin terpikirkan suatu perang antar negara ASEAN (Anwar 1998, h. 508). Juga ketidakformalan dari norma-norma ASEAN dianggap berhasil menarik seluruh kekuatan kekuatan besar seperti Cina, Rusia, Amerika Serikat, Jepang ke dalam ASEAN Regional Forum (ARF) (Leifer 1998, h.1).

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. TUJUAN

Penelitian ini pada dasarnya mempunyai tujuan utama untuk :

Pertama, mengungkapkan faktor-faktor inheren organisasi yang dianggap mempengaruhi memudarnya kohesi dan kredibilitas ASEAN dan meneliti penyebab ketidakmampuan organisasi dalam melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk menciptakan stabilitas keamanan di Asia Tenggara. Kemudian mengkaji seberapa jauh pengaruh faktor-faktor inheren tersebut berpengaruh terhadap perilaku organisasi.

Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan dan alternatif guna menguatkan peranan organisasi dengan melakukan improvisasi dan perubahan mekanisme dan norma-norma yang ada dalam organisasi.

Disamping dua tujuan utama diatas, penelitian ini juga ditujukan untuk ;

Ketiga, meningkatkan ketrampilan peneliti dalam melakukan pengkajian dan penelitian.

Keempat, menambah wawasan peneliti tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan ASEAN yang berguna bagi pengajaran dan kegiatan akademik lainnya.

B. MANFAAT

Pertama, deskripsi yang detail tentang sebab menurunnya persatuan dan kredibilitas ASEAN akan dapat menjadi referensi alternatif bagi para peminat studi ASEAN

Kedua, penemuan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi menurunnya peran ASEAN, selain sebagai referensi tambahan tentang masalah ASEAN juga dapat menjadi titik tolak bagi penelitian-penelitian lebih lanjut.

Ketiga, informasi-informasi yang ditemukan melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang dapat digunakan oleh siapa saja terutama pemerintah dan ASEAN dalam mengambil keputusan dan melakukan improvisasi dalam mengembangkan organisasi.



BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian ini sebagian besar akan dilakukan metode kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Sasaran umumnya atau yang akan menjadi populasinya adalah dokumen-dokumen resmi ASEAN, artikel, buku, majalah, internet, koran atau jurnal yang membahas tentang kegiatan, kebijakan dan isu-isu tentang ASEAN, khususnya masalah keamanan.. Kesimpulan terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini akan ditarik melalui analisis-*analisis* kualitatif.

Analisis dan pembahasan untuk menjelaskan tantangan dan prospek ASEAN ini akan dilakukan melalui : *pertama*, melakukan identifikasi dan kategorisasi karakteristik-karakteristik yang utama dari organisasi ASEAN khususnya berkaitan dengan integrasi organisasi dan upaya penanganan konflik; *kemudian* mengkaji tantangan, tekanan yang dihadapi berkaitan dengan karakteristik yang dimilikinya tersebut sehubungan dengan perubahan-perubahan kontemporer yang terjadi di dunia internasional dan dinamika domestik; *terakhir*, akan diambil suatu kesimpulan seberapa jauh nilai-nilai, norma-norma dan mekanisme dalam ASEAN perlu dirubah atau dikembangkan guna menghadapi tantangan tsb dan meningkatkan kredibilitas organisasi serta menciptakan kestabilan kawasan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

V.A. Tantangan Inheren Organisasi

ASEAN : Produk Keamanan Konvensional

Bahwa karakterdasar suatu organisasi akan menentukan *performance* dan pilihan kebijakan. Proses integrasi, tingkat keberhasilan serta kemajuan suatu organisasi kerjasama regional seperti : seberapa jauh tingkat kesolidan dan kekompakan diantara anggota untuk meraih keberuntungan bersama; seberapa jauh kemampuan menyelesaikan masalah (*problem solving*) diantara anggota maupun diluar anggota; dapat dikaitkan dengan berbagai faktor yang mendasari, dan menjiwai pembentukan organisasi tersebut. Paling tidak ada dua hal yang penting untuk dikaji : *pertama, style*, model atau tahap kerjasama yang dipilih oleh anggota organisasi. Semakin solid suatu organisasi dan semakin dalam kerjasama antar negara maka diperlukan suatu kesepakatan dan implementasi untuk lebih mengikatkan diri kepada organisasi yang lebih luas dari negara tersebut. *Kedua*, norma-norma keamanan (*security norms*) serta budaya keamanan dan strategis (*security culture* dan *strategic culture*) menentukan karakter organisasi, mengatur tingkah laku anggota dan sekaligus mengarahkan pilihan kebijakan dan kesepakatan regional. Norma dan budaya keamanan yang eksklusif akan menghambat upaya-upaya penyelesaian konflik secara maksimal diantara anggota dan diluar anggota organisasi.

Beberapa ciri yang menonjol dari kharakter ASEAN adalah sebagai berikut :

Pertama, ASEAN adalah tipe organisasi kerjasama regional yang bersifat *comprehensive security*. ASEAN bukan organisasi kerjasama regional yang hanya terfokus pada satu isu. Kerjasama regional ASEAN meliputi berbagai bidang. Dalam dokumen resmi ASEAN dicantumkan bahwa tujuan dan harapan dari asosiasi ini adalah dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi. Referensi tentang masalah keamanan, dan politik dalam deklarasi tersebut tidak dicantumkan secara jelas. Dokumen awal asosiasi ini, Deklarasi Bangkok tahun 1967,

menyebutkan bahwa kepentingan utama dari negara-negara ASEAN adalah penguatan stabilitas ekonomi dan sosial dan menjamin pembangunan nasional dan perdamaian.

Luasnya ruang lingkup yang menjadi perhatian ASEAN ditunjang tidak eksplisitnya masalah keamanan tercantum dalam ASEAN sesungguhnya menjadi dasar lemahnya kapasitas ASEAN dalam menangani masalah keamanan. Konsentrasi, materi yang harus terbagi untuk menangani bidang lain diluar keamanan mengurangi fokus dari upaya penyelesaian masalah keamanan, meski harus diakui bahwa masalah keamanan sekarang harus dilihat secara multidimensional. Posisi isu keamanan secara resmi di ASEAN yang tidak tercantumkan menjadi penghalang bagi pengembangan pola-pola keamanan dan pengamanan bersama.

Meskipun ASEAN telah mencanangkan bahwa isu-isu diluar keamanan seperti ekonomi dan sosial terkait erat dengan masalah keamanan namun dalam pelaksanaannya, kerjasama ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan yang seharusnya menunjang rejim keamanan di ASEAN tidak dapat terlaksana secara maksimal bahkan seringkali kontradiktif. Contohnya, untuk menunjang suatu organisasi regional yang solid diperlukan kondisi ekonomi yang saling melengkapi dan natural. Dalam kenyataan hubungan ekonomi diantara negara ASEAN menduduki proporsi yang lebih sedikit dibandingkan dengan pihak luar ASEAN. Hanya sekitas 20 % perdagangan intra ASEAN, sedangkan 80 % dilakukan dengan pihak diluar ASEAN. Produk yang dihasilkan oleh negara-negar ASEAN, kecuali Singapura hampir sama. Konflik kepentingan ekonomi lebih mendapatkan peluang dalam kondisi yang kompetitif dari pada ketika perekonomian antar negara dalam kondisi yang interdependensi, yang berarti saling membutuhkan. Ketidak mampuan bangsa untuk survive dalam persaingan ekonomi akan mengganggu perekonomian nasional dan pada tahap selanjutnya mengakibatkan instabilitas sosial dan keamanan.

Kedua, meskipun ASEAN mengembangkan skope kerjasama yang *comprehensive*, tapi lebih bersifat *inward looking security*. Prinsip ini menekankan bahwa ancaman utama bagi ASEAN adalah dilihat tidak datang dari luar batas wilayah, tapi dari dalam negeri (Dewit 1994:3). Tujuan yang disepakati diantara negara-negara ASEAN adalah terkonsentrasi untuk mendukung kepentingan nasional negara. Anggota-

anggota ASEAN berharap bahwa organisasi ini akan dapat mendukung kedaulatan negara melalui tiga tujuan bersama yang akan saling memperkuat yaitu : *pertama*, menciptakan hubungan ekonomi dan politik. Dengan mempererat hubungan ekonomi dan politik ASEAN berharap akan mengurangi ketegangan, krisis, dan kemungkinan konfrontasi terbuka diantara anggota-anggotanya. *Kedua* organisasi ini bertujuan mendorong pembangunan ekonomi negara-negara anggotanya. Diharapkan hal ini akan menyumbangkan stabilitas politik dengan memperbaiki kondisi sosial dan meredam bangkitnya komunisme. Pada waktu itu negara ASEAN mempertimbangkan bahwa ancaman pemberontakan komunis yang disponsori oleh pihak luar adalah merupakan sumber ancaman yang paling utama. *Ketiga*, organisasi ini menyatakan secara resmi mendukung keamanan dalam negeri. Maksudnya, ASEAN berupaya membuat anggota-anggotanya menjadi tidak lemah dari kekuatan pihak luar. ASEAN berpendapat bahwa intervensi dalam masalah regional adalah sumber konflik yang utama. Contoh yang paling mencolok adalah bahwa negara-negara ASEAN sangat mengkhawatirkan dukungan Cina bagi pemberontakan dalam negeri (Hukley 1990:85-95; Jorgenson Dahl 1982:45-64).

Prioritas dari pemerintah ASEAN adalah terkonsentrasi pada masalah sekitar peningkatan kondisi ekonomi dan memelihara kekuasaan rejim nasional dan menumpas kelompok pemberontakan yang melawan kekuasaan pemerintahan. Oleh karenanya mereka tidak siap untuk menciptakan suatu asosiasi yang kuat *vis a vis* masyarakat internasional atau membangun suatu aliansi melawan pihak luar (Buses 1999:39). Akibatnya adalah ASEAN tidak mampu menggalang suatu upaya keamanan dan diplomatik bersama dalam masalah Timor Timur sejak dini. ASEAN tidak mampu mengekspresikan suatu dukungan regional bersama atau tindakan bersama ketika negara diluar ASEAN, Australia, terlibat dan mendominasi penyelesaian masalah Timor Timur, dan berlanjut dengan kebijakan PBB untuk mengirimkan pasukan dan melakukan intervensi kemanusiaan.

ASEAN juga tidak dapat diandalkan dalam membantu negara-negara ASEAN dalam menghadapi krisis ekonomi yang berlanjut sejak tahun 1997 akibat sebagian besar dari bebasnya perdagangan mata uang internasional. Krisis ini tidak hanya mengguncangkan stabilitas sosial dan ekonomi, bahkan dibeberapa negara berdampak

pada perubahan politik yang drastis disertai ketidak stabilan keamanan nasional, khususnya di negara-negara Indonesia dan Philipina yang masih terbelit oleh krisis tersebut. ASEAN tidak mampu melakukan kebijakan bersama yang responsif guna menanggulangi krisis ekonomi secara cepat. Tidak ada respon berupa kebijakan yang terkoordinasi dan efektif yang bisa dilakukan ASEAN dalam menolak efek liberalisasi tersebut. Negara yang terkena krisis di kawasan ini tidak dapat mengandalkan bantuan dari ASEAN guna mengatasi situasi krisis. Akibatnya mereka merasa frustrasi terhadap ketidakmampuan ASEAN, dalam melakukan respon yang strategis guna menanggulangi krisis. ASEAN hanya mempunyai perangkat PTA (*Preferential Trade Arrangement*) yang sifatnya hanya subregional dan dampaknya tidak mampu untuk menanggulangi isu regional atau internasional yang lebih besar (Naya 2001:6). Sempitnya cara pandang dalam melihat musuh atau ancaman potensial, -- yang sesungguhnya bisa datang dari luar organisasi--, menyebabkan terhambatnya upaya menanggulangi krisis.

Ketiga, proses kerjasama ASEAN adalah bersifat *intergovernmentalis*. Proses integrasi di ASEAN menolak untuk memberikan kewenangan yang luas bagi organisasi dalam melakukan integrasi dan pengembangan organisasi seperti yang di jalankan pada model kerjasama *neofunctionalism*. Proses integrasi di ASEAN didominasi oleh negara, dikendalikan oleh para pembuat keputusan tingkat tinggi, para menteri dan kepala negara, atau pemerintah. Pendekatan kerjasama regional di ASEAN mengutamakan proses perkembangan asosiasi yang bertumpu pada otoritas negara dan bukan hal-hal yang bersifat natural.

Karena ASEAN adalah kerjasama yang mengutamakan *state-to state cooperation* maka kerjasama ASEAN tidak banyak memberi peluang akan keterlibatan lapisan dibawah pemerintah seperti para ahli, ilmuwan, kelompok kepentingan dan masyarakat. Ruang lingkup pengambil keputusan masalah penciptaan perdamaian dan keamanan masih terbatas pada -- meminjam model aktor dan pendekatan penciptaan perdamaian dari Lederach (1997:39)-- *first track diplomacy* daripada *second ataupun third track diplomacy*. Masalah keamanan di ASEAN lebih terfokus pada negosiasi tingkat tinggi dan hanya diikuti oleh pejabat tinggi negara mewakili negara. ASEAN hampir tidak memberi kesempatan dan dorongan bagi lapisan kedua dari para akademik, intelektual,

pemimpin-pemimpin yang berpengaruh dalam bidangnya dan pemimpin hak azazi manusia untuk melakukan pertemuan guna membantu memecahkan permasalahan. Demikian juga tidak pernah ada suatu forum bagi para pemimpin lokal, *indigenous* dan *community developers* untuk melakukan komisi perdamaian dan upaya mengurangi kecurigaan tingkat akar rumput. Pada tahun 2001 dimulai upaya-upaya untuk mendapatkan masukan dari kelompok dibawah negara sebagai upaya untuk lebih mengintegrasikan masyarakat ASEAN. Diadakan pertemuan regional di Batam tahun 2001 yang melibatkan wakil dari ilmuwan, para peneliti dan organisasi non pemerintah pemerhati masalah ASEAN. Namun upaya ini masih sangat terbatas.

Akibat dari terfokusnya proses pembuatan kebijakan, dan penyelesaian pertikaian yang bertumpu pada *state - to state cooperation*, ASEAN tidak mampu memecahkan permasalahan riil yang menyangkut masyarakat luas diantara negara ASEAN. Contohnya masalah tenaga kerja. ASEAN tidak mampu menjembatani sekaligus mengurangi krisis yang terjadi diantara negara Malaysia dengan Philipina dan Indonesia dalam masalah tenaga kerja. Terjadi pemulangan besar-besaran tenaga kerja dengan kondisi yang memprihatinkan. Kemudian juga terjadi perbedaan persepsi dalam memandang pentingnya peran tenaga kerja antara pemerintah dengan majikan di negara penerima. Masalah ini menunjukkan kelemahan pengimplementasi kebijakan regional tentang tenaga kerja akibat dari jenis kebijakan yang tidak berdasar pertimbangan yang natural. Krisis ini sekaligus menunjukkan bahwa kesepakatan masalah tenaga kerja hanya diinterpretasikan dan disepakati tingkat negara. Kebijakan regional dikeluarkan dengan tidak menyertakan aspirasi dan perwakilan langsung dari buruh dan majikan dalam penanganan masalah tenaga kerja.

Intensnya hubungan *government to government* sesungguhnya menunjukkan bahwa kapasitas ASEAN sebagai organisasi lemah. ASEAN sebagai organisasi regional lebih bertumpu pada negara bukan pada organisasi. Keberhasilan dan kemunduran ASEAN ditentukan sebenarnya oleh situasi dan kondisi domestik bukan pada organisasi. Ketahanan regional di ASEAN pada dasarnya tergantung pada ketahanan nasional. Contohnya adalah ketidakstabilan ekonomi dan politik yang ada pada saat ini di Indonesia dan Philipina telah turut menyumbangkan runtuhnya *prestige* organisasi. Kerusakan dan ketidakstabilan ekonomi dan politik di dalam negeri Philipina dan

Indonesia saat ini telah melemahkan ASEAN. Berlanjutnya krisis ekonomi yang ada di negara-negara ASEAN memberikan efek pada kemunduran institusi ASEAN dan peranannya dalam keamanan kawasan. Narine (1999,371) menyebutkan bahwa ASEAN lebih didasarkan atas *commonality* daripada *cooperation*. Jadi sesungguhnya, prestasi internasional ASEAN sebagai suatu organisasi regional yang dianggap berhasil, selain *European Community*, secara politik dan ekonomi diraih dari kesuksesan para anggotanya. Krisis ekonomi dalam negeri, oleh karenanya mempengaruhi reputasi ASEAN.

Tekanan dan tuntutan terhadap otonomi dan independensi, gerakan separatisme dan pemberontakan bersenjata yang muncul semakin kuat di Indonesia akan membuat wilayah ini makin rawan. Arus penguingsi akan memberikan dampak pada negara tetangga dari Indonesia. Demikian juga gerakan pemberontakan yang terjadi di Myanmar, Kamboja, gerakan separatis Patani di Thailand Selatan dan kekhawatiran dari Pemerintah Malaysia Barat akan efek contagion jika penduduk lokal di Malaysia Timur mengklaim otonomi dan separatisme. *'Uppermost in their minds is the threat a wounded Indonesia poses to intra ASEAN harmony'* (Vatikosis et al. 1999,16).

Ketidak tegasan dan perbedaan persepsi tentang masalah terorisme saat ini juga berdampak pada kekompakan organisasi. Beberapa negara menuduh Indonesia tidak tegas menanggapi masalah terorisme, sedangkan Singapura dan Philipina berupaya menunjukkan sikapnya yang tegas terhadap kelompok Islam yang dianggap sebagai teroris. Keseluruhan perlawanan dan pemberontakan serta kerawanan yang ada di negara masing-masing telah menurunkan image ASEAN sebagai *'a zone of freedom, peace and neutrality'*.

Keempat, ASEAN bukan tipe yang ideal atau *mature* dari suatu model tahap kerjasama keamanan regional yang berkembang. Tipe ideal dari kerjasama regional saat ini umumnya mengacu pada ide Karl Deutsch tentang *Security Community* yang merujuk pada penjelasan perkembangan kerjasama diantara negara-negara di Atlantik Utara. Model organisasi keamanan regional tersebut nampaknya tidak tepat diterapkan untuk menjelaskan fenomena kerjasama keamanan regional di kawasan Asia Tenggara. Kondisi di negara-negara Asia Tenggara saat ini menunjukkan situasi yang berbeda. Bahwa

konflik dan krisis hubungan seringkali timbul diantara negara-negara ASEAN disertai kerusuhan, perang, kekerasan dan tuntutan separatisme di dalam negeri.

Alasan lain yang menyatakan bahwa model *Security Community* tidak mungkin diterapkan pada ASEAN, terutama bila dikaitkan dengan konsep liberalisme. Kriteria *security community* dengan syarat kondisi politik dan sosial yang menganut dan mengimplementasikan demokrasi liberal tidak terpenuhi. Beberapa negara telah melakukan demokrasi seperti Filipina, Indonesia, dan Thailand namun inipun masih terbatas dan belum memenuhi kriteria sesungguhnya dari demokrasi liberal. Bahkan pada awal pembentukannya negara-negara ASEAN dalam situasi pemerintahan yang otoriter.

Terlebih lagi jika munculnya *security communities* diasumsikan dengan politik dan ekonomi yang liberal, berarti konsep ini mempunyai suatu keterbatasan dalam mengamati dinamika kemandirian di Asia Tenggara. Politik yang tidak liberal cenderung menjadi identitas dari negara-negara Asia Tenggara. Kemudian interdependensi ekonomi regional dan integrasi juga kurang berkembang daripada di Eropa. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan ide neo-fungsionalisme pada tahun 1970 an oleh Erns Hass dan Joseph Nye yang menyatakan bahwa absennya pluralisme dalam negeri adalah merupakan suatu alasan mengapa integrasi regional gaya Eropa tidak terjadi di Asia Tenggara. Ini berarti menjelaskan mengapa sistem regional di Asia Tenggara tidak dapat mendapatkan untung dari dampak saling ketergantungan dalam suatu organisasi regional. Kesimpulannya, dari perspektive liberal, tingginya otoritarian politik dan relatif rendahnya level ketergantungan ekonomi regional menghalangi munculnya suatu masyarakat keamanan regional .

Jika ASEAN bukan termasuk tipe kerjasama regional *security community* bagaimana kemudian harus mengkategorikan kerjasama keamanan ASEAN ? Harus diingat bahwa ASEAN tidak gagal sebagai suatu organisasi keamanan regional. Pada tingkat tertentu, ASEAN telah berhasil dalam meredam konflik antar negara sehingga tidak menjadi suatu konflik yang terbuka. Ini adalah suatu keberhasilan tersendiri, terutama bila dikaitkan dengan konflik dan kekerasan yang terjadi pada kebanyakan negara dunia Ketiga semacam Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika dan Amerika Tengah.

Merujuk pada modifikasi ide Deutsch tentang *security community* dari Adler dan Barnett (Archarya 1997: 4). tentang tiga fase dalam pembangunan komunitas yaitu *nascent*, *ascendant*, dan *mature*, perkembangan ASEAN nampaknya tidak dapat dengan mudah dikaitkan dengan langkah-langkah kearah *security community* seperti yang disarankan oleh Adler, meski tidak diragukan bahwa mempromosikan *security community* dalam pengertian Deutsch adalah tujuan utama dari pendiri ASEAN ketika membentuk kelompok tahun 1967. Contohnya Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN segera mengakhiri kebijakan konfrontasi melawan negara baru Singapura dan Malaysia yang dirasakan sangat menguras ongkos bagi perkembangan ekonomi dan stabilitas wilayah. Jadi mencegah terjadinya pertikaian sesungguhnya pertimbangan utama dibalik pendirian ASEAN.

Namun bila harus membandingkan ketiga tahap menuju suatu *security community* tersebut, maka tahap perkembangan ASEAN belum sampai pada fase tipe kerjasama regional yang *mature*, lebih condong pada fase komunitas keamanan *nascent*. Hal ini dikaitkan dengan evolusi ASEAN yang lebih ditujukan untuk menghilangkan saling curiga antara negara, menciptakan identitas bersama ASEAN, membentuk solidaritas, persamaan persepsi dan memperluas kedaulatan negara ketimbang perluasan kewenangan organisasi regional, dan koordinasi militer yang kuat. ASEAN mungkin sedang menuju suatu *security community*, merupakan tahap yang paling awal dari bentuk *Security Community*, tanpa melakukan sharing nilai-nilai demokrasi liberal atau ketergantungan ekonomi intra regional dalam tingkat yang substantial.

Kelima, dalam upaya melakukan integrasi dan mengelola konflik, ASEAN menggunakan strategi yang terbatas. Sejak awal pengelolaan konflik ASEAN lebih ditujukan untuk mengatasi *intra mural* konflik dari pada *extra mural* dan *domestic conflict*. Meskipun ketiganya dapat dilakukan oleh suatu rejim keamanan regional. ASEAN adalah merupakan produk dari Perang Dingin. Pada awalnya organisasi ini didirikan untuk mengurangi ketegangan antara negara-negara non-komunis di Asia Tenggara. Organisasi ini diciptakan sebagai upaya untuk meredakan konfrontasi yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Presiden Indonesia Suharto yang terpilih menggantikan Presiden Sukarno berupaya untuk menunjukkan sikap kontra

terhadap komunis guna mendapatkan simpati dari pihak Barat dengan membuka kembali hubungan dengan kedua negara yang sempat krisis dibawah kepemimpinan Presiden Sukarno berkaitan dengan isu 'ganyang imperialisme'.

Strategi pengelolaan konflik yang dilakukan oleh ASEAN sebagian besar masih dilakukan dalam tahap *assurance*. Kerjasama ASEAN dilakukan dengan mengembangkan strategi seperti: *mutual confidence*, *mutual trust*, dan menciptakan suatu *regional confidence* dengan melakukan *sharing threat perception*. Secara historis, selama delapan tahun pertama, ASEAN relatif tidak produktif, meskipun organisasi ini nampaknya memberikan sumbangan bagi suatu pembentukan nilai-nilai *regional confidence* dan non intervensi. Perubahan-perubahan ancaman dalam lingkup regional, seperti persepsi tentang menurunnya komitmen Amerika terhadap sekutu lokalnya dan munculnya Cina sebagai suatu kekuatan politik regional menggantikan peran Amerika Serikat, telah menyatukan ASEAN.

Beberapa persetujuan dicapai dalam menanggapi situasi politik keamanan secara umum dikawasan ini. Salah satu persetujuan adalah *ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom and Neutrality)* pada tahun 1971. *ZOPFAN* menyepakati upaya negara-negara ASEAN 'to exert initially necessary efforts to secure the recognition of, and respect for, Southeast Asia as a Zone of Peace, Freedom and Neutrality, free from any form or manner of interference by outsider Powers' (Dokken 2001 : 511). Dalam kenyataan anggota-anggota ASEAN mempunyai pandangan yang berbeda tentang isi dari persetujuan tentang netralitas kawasan. Tidak ada program yang spesifik bagi *ZOPFAN* untuk dikembangkan. Tetapi persetujuan ini memberikan perhatian yang lebih pada hak-hak bagi kenetralan negara, semacam hak untuk menjadi anggota PBB, hak untuk melakukan perdagangan selama tidak melanggar netralitas negara, hak untuk menerima bantuan (termasuk peralatan militer) selama ini sifatnya pertahanan dan tidak ada keuntungan politik sebagai timbal balik.. Persetujuan tentang netralitas ASEAN adalah contoh utama dari kebijakan yang bisa dikategorikan sebagai *externalization* atau kebijakan luar ASEAN dalam menghadapi pihak diluar anggota. Menurut Dahl (dalam Dokken 2001:511) *Externalization* adalah adalah konsep yang merujuk pada proses dimana anggota-anggota organisasi mengembangkan suatu posisi yang sama dalam hubungan mereka dengan non anggota. Fenomena eksternalisasi adalah suatu fenomena

yang terkait dengan aksi dari organisasi atau pemerintahan diluar kawasan. Persepsi tentang ancaman pihak luar adalah yang utama dalam hubungan ini bagi suatu organisasi regional.

Pada tahun-tahun berikutnya, bentuk dari persetujuan netralitas negara-negara ASEAN adalah mengembangkan posisi *common perception* dalam beberapa kebijakan terhadap non ASEAN. ASEAN berkembang menjadi suatu organisasi yang sifatnya *sharing perception of threat*. Diantaranya yang paling penting adalah hubungan dengan Cina, Vietnam dan Kamboja. Negara-negara ASEAN telah mempunyai persamaan perasaan ketakutan yang besar terhadap Cina. Namun sebenarnya bukan terhadap serangan Cina, tapi kekhawatiran tentang infiltrasi dukungan terhadap komunis dalam negeri yang dikhawatirkan akan menggoyahkan stabilitas sosial negara-negara ASEAN. Kemenangan komunis pada tahun 1975 yang disertai reunifikasi Vietnam tahun 1975 dibawah Komunis telah mengejutkan ASEAN. Peristiwa ini menandai semakin berkembangnya status ASEAN sebagai kelompok regional. Kemenangan komunis pada tahun 1975 telah membuat anggota ASEAN untuk meningkatkan koordinasi hubungan mereka dalam menghadapi negara baru Republik Vietnam. Menurut Dahl (dalam Dokken 2001:552) '*[N]o single external matter after 1975-76 has served as strongly as the SRV issue to produce a sense of solidarity and cohesion among the ASEAN five*'. Konflik antara Vietnam dan Kamboja dan invasi Vietnam ke Kamboja semakin mengintensifkan solidaritas dan kesatuan ASEAN.

Sebagai pengembangan dari sikap bersama *vis a vis* terhadap Vietnam dan Cina yang diinspirasi dari bahaya pertikaian antara Vietnam dan China serta Kamboja bagi kedaulatan nasional, maka ASEAN mencanangkan persetujuan untuk menghormati kedaulatan nasional masing-masing negara. Kesepakatan ini tertuang dalam tersebut. Pada Februari 1976, ASEAN mencanangkan *ASEAN Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) pada Febuari 1976.

Para penandatangan perjanjian TAC ini menyetujui suatu penyelesaian damai terhadap perselisihan diantara mereka dan saling menghargai kedulatan masing-masing negara. Prinsip kedaulatan nasional adalah inti dari perjanjian TAC tersebut. Perjanjian ini juga menjelaskan bahwa ASEAN sesungguhnya tidak pernah bermaksud untuk menjadi suatu mekanisme bagi bagi penyelesaian pertikaian dan konflik bagi



anggotanya. Terlebih lagi ASEAN bukan suatu asosiasi yang mempunyai mekanisme yang langsung dapat membantu penyelesaian konflik dalam negeri karena ini akan melanggar prinsip TAC yang telah disepakati. Sampai saat ini TAC masih menjadi jiwa dari ASEAN, dan belum ada suatu modifikasi penting yang disepakati bersama diantara anggota-anggota untuk lebih menguatkan peran organisasi.

Oleh karena kuatnya prinsip TAC ini dikembangkan, maka bisa dimengerti bahwa ASEAN akan kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan domestik yang terjadi di masing-masing negara dan perkembangan internasional saat ini. Sejak awal skope manajemen konflik tidak memberi kesempatan bagi ASEAN untuk turut membantu memecahkan masalah dalam negeri. ASEAN juga tidak ditempa untuk menjadi organisasi regional yang mampu menyelesaikan masalah ASEAN dengan diluar ASEAN.

ASEAN seringkali tidak melakukan suatu tindakan yang kooperatif dalam kasus-kasus yang kemungkinan akan mengoyangkan kesatuan atau ancaman nasional bagi posisi rejim. Contohnya, pemimpin ASEAN tidak menunjukkan kekompakannya untuk mengkritik dan mendukung kebijakan terhadap Anwar Ibrahim, mantan wakil Perdana Menteri Malaysia. Dalam kasus Timor Timur, persepsi anggota ASEAN tentang masalah ini saling berbeda. Para Jendral di Myanmar menyatakan simpati terhadap Indonesia, sebaliknya Malaysia dan Thailand meski terlambat menyetujui pengiriman pasukan perdamaian tapi kemudian meragukan siapa yang seharusnya menjadi komandan di lapangan (Vatikosis et al. 1999:14). Lemahnya ASEAN dalam meraih momentum dalam kasus Timor Timur adalah jelas karena ASEAN tidak secara solid menyatakan dukungan regional ataupun menolak kebijakan Indonesia terhadap Timor-Timur. Saat ini, ASEAN tidak mampu memberikan suatu solusi bersama bagi masalah instabilitas dalam negeri yang diakibatkan oleh separatisme di Indonesia dan Philipina. Tidak ada mekanisme yang bisa menggerakkan ASEAN untuk membantu penyelesaian yang kemungkinan akan berdampak pada keamanan tingkat regional saat ini secara kompak. Jadi upaya pengelolaan konflik yang dilakukan oleh ASEAN sangat terbatas, organisasi ini tidak mencoba untuk menyelesaikan masalah, tapi sesungguhnya hanya pada upaya untuk menghindari konflik.

Tambahan, multilateralisme adalah suatu konsep yang bukan menjadi kebiasaan dikalangan anggota ASEAN, negara ASEAN tidak mempunyai pengalaman penting sebelumnya dalam kerjasama antar negara. Bilateralisme adalah suatu model yang lebih disukai dari hubungan keamanan dan penyelesaian pertikaian. Misalnya pertikaian perbatasan antara Malaysia dan Indonesia, atau Malaysia dan Thailand di tangani secara *bilateral joint border committees*. Hubungan keamanan antara negara-negara ASEAN seperti latihan militer dan *sharing intelegent* juga dilakukan dalam tingkat bilateral. Bahkan hingga kini anggota ASEAN melanjutkan untuk menangani masalah pertikaian dalam ASEAN dan kerjasama pertahanan melalui saluran-saluran bilateral. Kontribusi dari multilateralisme untuk *comunity building* terletak tidak dalam memberikan suatu mekanisme institusi formal bagi resolusi konflik, tapi lebih pada mendorong sosialisai elit memfasilitasi *problem solving* (Jorgensen-Dahl dalam Acharya 1997: 13)

Kenyataan menunjukkan bahwa anggota ASEAN lebih menyukai kerjasama/persetujuan bilateral daripada kesepakatan multilateral yang dapat mengikat keseluruhan anggota. Ini menunjukkan bahwa ASEAN belum berangkat dari perkembangan awal terbentuknya organisasi ini memberikan mekanisme tumbuhnya saling percaya (*confidence building mechanism*) daripada *conflict resolution*.

B. Eksklusifitas dan Keterbatasan Norma dan Budaya Keamanan

Norma non intervensi dan ASEAN way

Ciri khas perilaku dan pola-pola kemandirian di ASEAN, yang membedakannya dengan organisasi regional dikawasan lain adalah terletak pada norma atau budaya kemandirian. Menurut Mahbubani (1995:115) negara-negara di Asia Tenggara menggunakan beberapa element '*corporate culture*' bagi keamanan regional. Sejauh ini paling tidak ada dua norma atau budaya keamanan yang diterapkan yaitu norma *non intervensi* dan *ASEAN Way* Negara di Asia Tenggara menganut prinsip *non interference* atau tidak turut campur dalam masalah dalam negeri. Mahbubani menyatakan bahwa terlalu berbahaya bila negara lain berkomentar atau turut campur dalam urusan dalam negeri di negara-negara berkembang karena akan menimbulkan konflik seperti yang terjadi di Asia Selatan. Oleh karenanya dia beranggapan mengapa perang tidak terjadi

diantara negara-negara ASEAN selama lebih dari 25 tahun karena negara-negara ASEAN menganut prinsip non intervensi.

Dalam ASEAN, norma non intervensi secara resmi tercantum dalam *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). Ketentuan dalam TAC berisis :

(1) *mutual respect for the independence, sovereignty, territorial integrity of all nations* (2) *the right of every state to lead its national existence free from external interference, subversion and coercion* (3) *non-interference in the internal affairs of one another* (4) *settlement of differences and disputes by peaceful means* (5) *renunciation of the threat of use of force* (Simon 1998, 197).

ASEAN juga menciptakan suatu rangkaian prosedural norma yang disebut dengan 'ASEAN way'. ASEAN way ini lebih merujuk pada petunjuk bagaimana konflik harus dikelola. Nordin Sopiee (dalam Buses 1999,47) mengidentifikasi beberapa norma ini sebagai berikut : ...*the principle of seeking agreement and harmony, the principle of sensitivity, politeness, non-confrontation and agreeability, the principle of quiet, private and elitist diplomacy versus public washing of dirty linen*. Merujuk pada contoh ASEAN Way adalah bahwa menyelamatkan muka (*face*) adalah sangat penting bagi hubungan antar negara. Kehilangan muka berarti dapat menimbulkan konflik. ASEAN way menurut Brian Job (1997:15) menekankan inklusion, dialog, *soft agenda*, dan konsensus pengambilan keputusan. Institusi formal dan organisasi birokrasi tidak dianjurkan; mekanisme untuk memonitor dan memastikan transparansi tidak disarankan. Jadi, prinsip ini mengakui penggunaan non kekerasan, lebih berfokus pada kepentingan dan kedaulatan kedalam, konsensus dan hal-hal yang tidak formal dalam pengelolaan konflik yang kesemua itu mempengaruhi tingkah laku ASEAN dengan prinsip non intervensi sebagai kunci utamanya.

Adalah tidak dapat dipungkiri bahwa pada tingkat tertentu norma ASEAN diakui menjadi faktor yang mendukung keberhasilan dalam mengatasi masalah-masalah regional. Negara-negara ASEAN telah berhasil menghindari sejumlah pertikaian politik dan teritorial diantara mereka. 'Pada saat ini, adalah suatu yang tidak terbayangkan jika anggota ASEAN berperang melawan anggota yang lain meskipun dengan berbagai alasan' (Anwar 1998:508). Norma non intervensi dan *non-use of force* adalah faktor yang mendukung kampanye ASEAN dalam mengisolasi Vietnam karena invasi negara ini ke Kamboja tahun 1976 (Archarya 1997:14). Keinformalan dari forum ASEAN juga

menarik seluruh kekuatan *major power* untuk bergabung dalam *ASEAN Regional Forum* (ARF). Snitwongse (1995:962) beranggapan bahwa proses dialog secara informal dalam ARF berhasil dalam memberikan forum dimana negara-negara partisipan dapat menyuarakan kepentingannya dalam ARF. Leifer (1998:1) juga menyatakan bahwa ASEAN telah menjadi '*the primary driving force*' atau kekuatan utama yang mendorong proses multilateral tersebut. Meskipun ada banyak kritik bahwa prinsip-prinsip dari *ASEAN way* dapat dijalankan dalam ARF karena lingkungan dalam mana interaksi terjadi memungkinkannya (Narine 1997:967). *ASEAN way* dianggap sebagai suatu eksperimen yang berhasil dalam mengembangkan kerjasama multilateral ekonomi dan keamanan. Beberapa analis bahkan membandingkan ASEAN dengan *security community* yang mengambil langkah yang berbeda dari *prototype* Eropa yang mengambil ciri khusus dari konsensus kolektif dengan menggarisbawahi penggunaan aksi tanpa kekerasan. Paling tidak, dalam banyak cara, norma ASEAN telah berhasil memelihara stabilitas regional di Asia Tenggara, khususnya sebelum Asia Tenggara dihantam Krisis Ekonomi Asia tahun 1997 dan membantu terbentuknya suatu rejim keamanan di Asia Pasifik dalam bentuk ARF.

Tetapi, sejak ulang tahun ke 30 ASEAN, Juli 1997, *ASEAN way*, dan khususnya norma non intervensi secara ironis menjadi suatu alasan utama dari runtuhnya reputasi ASEAN. Keterbatasan yang inheren dimiliki oleh norma non intervensi menjadi faktor dalam menerangkan sebab menurunnya efektivitas organisasi. Alasan untuk mengaplikasikan norma non intervensi sesungguhnya telah ketinggalan jaman bila dikaitkan dengan perkembangan lingkungan internasional dan regional. Prinsip non intervensi menjadi doktrin bagi ASEAN pada tahun 1976 ketika anggota ASEAN merasa ketakutan dengan dukungan pihak luar terhadap bangkitnya pemberontakan komunis dalam negeri (Henderson 1999:16). Padahal dengan runtuhnya bipolar system, dan perluasan ASEAN dengan memasukkan Vietnam yang negara komunis, alasan untuk mempertahankan secara kuat prinsip non intervensi menjadi tidak relevan.

Tambahan, prinsip utama dari pengelolaan konflik di ASEAN dengan non intervensi sebagai satu mekanisme adalah tidak untuk menyelesaikan konflik. Norma non intervensi dirancang meminjam istilah Stein (1982: 309) sebagai '*dilemma of common*

*aversion*¹ yang berarti norma yang diadopsi oleh ASEAN tidak akan dapat mencakup kompleksitas dari kepentingan anggota. Contohnya pada pertemuan APEC di Selandia Baru tahun 1999, APEC mengumumkan keputusannya untuk membahas bersama tentang krisis Timor Timur, tapi ASEAN memutuskan bahwa anggotanya tidak akan hadir sebagai suatu group, tapi masing-masing negara dapat memutuskan sendiri untuk berpartisipasi atau tidak (Reyes 1999:33). Sebagai akibatnya, norma intervensi adalah didekasikan terutama lebih pada upaya untuk memelihara hubungan antara negara ASEAN daripada sebagai suatu alat yang efektif dalam penyelesaian konflik.

Selanjutnya, penerapan dari norma non intervensi ini juga tidak konsisten. ASEAN dalam kenyataan tidak mengecam tindakan yang tidak sah dari rejim militer Burma yang melakukan kudeta kekuasaan sipil, dan melakukan tindakan represif terhadap suku minoritas Karen. Tetapi sebaliknya ASEAN menanggukkan keanggotaan Kamboja dalam ASEAN setelah kudeta tahun 1997, meskipun sebelum kudeta tersebut muncul, pertemuan para Menteri luar negeri ASEAN tahun 1997 telah menyetujui menerima Kamboja sebagai anggota penuh ASEAN. Terdapat kecaman dari kelompok hak asasi manusia, *the Burma Solidarity Group Malaysia*, bahwa ada suatu *vested interest* dari ASEAN '*When it is convenient, as in the case of Cambodia, the ASEAN is prepared to interfere in the affairs of another country*' (Hiebert 1999:18). Jadi sesungguhnya ASEAN menganut standard ganda dalam penerapan norma tersebut yang dapat menjadi masalah bagi ASEAN sendiri.

Kelemahan berikutnya dalam non ontervensi adalah berkaitan dengan tekanan pihak luar. Pengertian non intervensi menerima tantangan dari perluasan nilai-nilai hak-hak azazi manusia, demokrasi dan ide-ide lingkungan yang secara kuat dikampanyekan oleh pihak Barat. Di ASEAN, non intervensi diinterpretasikan sebagai suatu komitmen yang kuat terhadap kedaulatan negara (Busse 1999:46). Ide normatif dari kedaulatan menjadi standard acuan bagi hampir semua keputusan politik di kawasan dan merupakan landasan bagi semua upaya ASEAN dalam menciptakan aturan regional. Tetapi, masalah yang dianggap sebagai suatu masalah internal, domestik, telah menjadi masalah internasional dan setiap orang, contohnya masalah hak azazi manusia. Pihak Barat

¹ Dalam '*dilema of common aversion*', para aktor mempunyai kepentingan yang sama untuk menghindari hasil diluar keinginannya yang akan mengancam kepentingannya.

cenderung melihat hak azasi manusia memiliki karakter internasional, sementara perspektif ASEAN melihat hak azasi manusia di bentuk oleh masing-masing bangsa berdasarkan serangkaian pengalaman sejarah, budaya, agama, dan adat-istiadat yang berbeda. Dengan kata lain, pemerintah ASEAN beranggapan implementasi dari masalah hak-hak azasi manusia adalah merupakan hak negara, tidak dapat diintervensi oleh pihak luar.

Perbedaan interpretasi hak-hak azasi manusia dan demokrasi antara ASEAN dan pihak luar ASEAN secara jelas ditunjukkan ketika ASEAN tidak secara bersama mengecam dan mengisolasi rejim pemerintahan Myanmar, sebagaimana negara Barat, tapi malahan tetap menerima rejim Myanmar untuk bergabung dengan ASEAN pada bulan Juli 1997 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan (Thayer 1999:12). Juga sosok ASEAN terlihat tidak melakukan tindakan yang penting dalam kasus Timor-Timur, sementara negara Barat dan Australia sangat profokatif (Asia Week 1999, 24 September). Dalam masalah isu lingkungan, akibat dari isu *transboundary haze* pada tahun 1997-1998, ASEAN dikritik tidak hanya ketidakrelevanan diplomasi ASEAN, tapi juga ASEAN tidak mampu untuk mengambil suatu tindakan yang nyata dan cenderung mengutamakan solidaritas rejim (Cotton 1999:14). Perbedaan pandangan antara ASEAN dan masyarakat internasional tentang kebijakan nonintervensi dan diikuti oleh ketidakmampuan prinsip tersebut dalam menanggulangi masalah telah menurunkan reputasi ASEAN.

Skope dari prinsip non intervensi telah diinterpretasikan secara sempit padahal batas masalah-masalah dalam negeri adalah menjadi kabur. Garis batas antara masalah dalam negeri dan isu-isu eksternal atau transnasional menjadi berkurang. '*Many domestic affairs have obvious external or transnational dimension, adversely affecting neighbors the region and the region relation with others*' (Eng 1999: 56). Contohnya masalah keamanan di Burma tidak hanya berimbas pada pemerintahan Thailand yang harus berurusan dengan para pengungsi yang melintas batas dan harus turut terlibat dalam masalah dalam negeri Burma, tapi pemerintah Thailand juga menuai kritik dari masyarakat Thai sendiri dalam penanganan kasus Burma ini pada tahun 1989 (Collins 1999:98). Masalah asap dari kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 1997-1998 adalah contoh yang paling jelas bahwa masalah internal dapat menimbulkan dampak yang sangat

menggangu bagi negara lain dan dampak ini juga memakan ongkos baik materi, kesehatan, dan hubungan sosial dan politik antara Indonesia dan negara ASEAN lain, disamping kritik dari seluruh dunia. Tanpa suatu pengecualian atau pendekatan tertentu terhadap ruang lingkup, batas, tipe masalah, maka norma non intervensi yang digunakan oleh ASEAN tidak akan mampu untuk menangani dan menyelesaikan konflik dengan memuaskan.

Modifikasi dari norma non intervensi juga tidak berkembang baik karena adanya penolakan dari negara-negara yang konservatif dan otoritarian dalam ASEAN. Kegagalan kebijakan *constructive engagement* terhadap Vietnam dan ketidakmampuan ASEAN menolong Kamboja telah mengundang perdebatan tentang norma tersebut. Terdapat beberapa saran untuk memperbaiki norma non intervensi mulai dari '*constructive intervention*'² yang pernah diusulkan oleh bekas Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, sampai '*flexible engagement*'³ yang diusulkan oleh Surin Pitsuwan, Menteri Luar Negeri Thailand. Indonesia, Malaysia and Singapore menolak realisasi dari model-model ini (Henderson 1999:53). Anggota-anggota baru menolak setiap perubahan dari norma non intervensi ini. Vietnam adalah pendukung paling kuat dari penerapan non intervensi dan secara tegas menolak revisi non intervensi. ASEAN menghindari tekanan secara organisasional terhadap pemerintah Myanmar dan intervensi secara terbatas dalam kasus Myanmar hanya sebatas bilateral. Toleransi Myanmar terhadap tekanan bilateral tidak berarti akan menerima pembaharuan dalam prinsip-prinsip non intervensi (Henderson 1999:52). Pemerintah Myanmar menyadari karakteristik dan kondisi dari rejimnya yang akan menjadi target paling awal jika ASEAN melakukan perubahan pendekatan non intervensi. Posisi defensif dan menolak ide-ide pembaharuan non intervensi oleh negara-negara ASEAN menjadi suatu kendala bagi upaya penyelesaian masalah dan komunikasi diantara negara-negara ASEAN dalam mencapai kualitas integrasi regional yang lebih solid.

² Model *constructive intervention* berangkat dari perkembangan situasi setelah Perang Dingin berakhir dalam menilai tentang kedaulatan dan non intervensi termasuk respon internasional terhadap meluasnya kasus '*failed states*' dan meningkatnya kebijakan luar negeri tentang masalah hak asasi manusia dan demokrasi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pertama, daya rekat dan solidaritas diantara anggota ASEAN ditengarai semakin memudar akhir-akhir ini terutama pasca krisis ekonomi Asia, karena ketidakmampuan organisasi ini untuk melakukan transformasi menyesuaikan diri dengan perubahan dan tuntutan yang ada. ASEAN mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang bersumber pada mekanisme, karakteristik, *style* serta budaya keamanan yang dianutnya. Integrasi di ASEAN ditentukan dan didominasi oleh *state to state cooperation*. Strategi dan budaya keamanan yang dikembangkan masih sangat terbatas. Bentuk pengelolaan konflik masih bersifat informal, tidak efisien, yang seringkali tidak menyelesaikan masalah, hanya menghindari masalah. Norma non intervensi dan *ASEAN way* menjadi penghalang bagi organisasi untuk turut menyelesaikan permasalahan. Norma dan budaya keamanan ASEAN mengandung beberapa keterbatasan a.l. : tidak lagi relevan, tidak dapat menyelesaikan konflik dan berstandar ganda, oleh karenanya menimbulkan ketegangan di didalam ASEAN dan pihak luar. Meski harus diakui bahwa norma dan mekanisme tersebut bukan variabel yang independen. Perbedaan kepentingan dan tekanan pihak luar juga turut menyumbang ketegangan di didalam ASEAN. Terdapat tuntutan integrasi politik dan keamanan yang lebih besar di ASEAN karena permasalahan-permasalahan keamanan yang tidak lagi mengenal batas wilayah. Juga krisis ekonomi dan berlanjutnya ketidakstabilan politik dan keamanan di Indonesia turut andil dalam menurunnya kredibilitas ASEAN.

Kedua, bahwa ASEAN belum mencapai dan mempraktekkan suatu kerjasama dan solidaritas regional yang maksimal. Mekanisme kerjasama ASEAN belum diterjemahkan menjadi tindakan politik yang mengikat dan operasional. ASEAN bertindak seolah-oleh negara-negara ASEAN tidak benar-benar membutuhkan respon regional bagi permasalahan regional. Padahal tantangan baru semacam krisis ekonomi, masalah kebakaran hutan, terorisme, membutuhkan reaksi proaktif bersama ASEAN jika masalah-masalah serius tersebut akan di tanggulangi dan diselesaikan.

³ *Flexible engagement* appeared to imply that ASEAN would act as a forum for members to comment on the behavior of their neighbors, where this behavior had a cross-border impact, or where it affected ASEAN's diplomacy credibility.

Ketiga, terdapat implikasi yang serius dari melemahnya peranan ASEAN. ASEAN akan kehilangan posisi tawar menawarnya berhadapan dengan pihak luar. Oleh karenanya kawasan ini akan menjadi obyek penguasaan keamanan bagi negara kawasan lain.

Keempat, ASEAN menghadapi masalah dalam memelihara kesatuan dan kohesinya disebabkan nilai *ASEAN Way* khususnya konsensus dan norma non intervensi. Jika ASEAN bersikeras untuk memelihara statusquo dan melanjutkan pelaksanaan norma non intervensi, ASEAN akan menghadapi kritikan dan tekanan dari Amerika Serikat dan masyarakat Eropa karena tidak mempromosikan hak-hak azazi manusia dan demokrasi. Tapi mengabaikan norma non intervensi akan mendapatkan perlawanan yang kuat dari rejim otoriter dalam ASEAN.

SARAN

Pertama, menurunnya kredibilitas ASEAN pada akhir-akhir ini seyogyanya dapat mendorong tumbuhnya nilai-nilai positif asosiasi. Anggota ASEAN akan sadar tentang pentingnya ketergantungan terhadap organisasi, tidak hanya bergantung pada ketahanan nasional dan pendekatan *self help*. Apa yang selama ini terjadi adalah lebih menguatkan dan mengutamakan kepentingan domestik daripada menguatkan asosiasi. Kemampuan organisasi harus ditingkatkan apabila akan bertindak sebagai manager regional.

Kedua, bahwa konflik yang dihadapi oleh ASEAN seharusnya bisa menjadi suatu *driving force* bagi kelanjutan proses integrasi dalam ASEAN. Konflik dan permasalahan harus dilihat secara positif. ASEAN harus melihat konflik, menurunnya kesolidan antar anggota dan kredibilitas akhir-akhir ini sebagai suatu tahap awal dalam melakukan perbaikan institusi.

Ketiga, sudah saatnya bagi ASEAN untuk bertindak sebagai organisasi yang lebih berguna bagi anggotanya. ASEAN seyogyanya mampu berlaku sebagai suatu organisasi dengan satu suara untuk meningkatkan posisi tawar menawar *vis a vis* kekuatan luar, tidak membiarkan setiap negara untuk berjuang sendiri.

Keempat, ASEAN harus melakukan perubahan dalam cara pandang melihat dan memahami masalah. ASEAN harus melakukan perbaikan dengan melakukan *new way thinking of our problem*. Di level internasional telah terjadi perubahan perubahan yang

sangat mendasar dalam melihat bahaya, ancaman dan upaya penciptaan keamanan (*what who is the threat ?, how's to secure?*). ASEAN seyogyanya dapat menyamakan persepsi tentang masalah internasional agar dapat tetap *survive* dan *solid*. ASEAN harus melihat keterkaitan internasional menjadi kunci penyelesaian masalah kontemporer. Oleh karenanya ASEAN harus melakukan kaji ulang terhadap paradigma keamanan yang konvensional.

Kelima, ASEAN harus bisa meningkatkan integrasi dan kohesi dengan memodifikasi nilai-nilai dan norma norma yang menghalangi integrasi dan pengembangan organisasi lebih luas. Misalnya melakukan improvisasi norma non intervensi, dan *ASEAN way* yang sudah tidak sesuai dengan dinamika yang ada. Mestinya nilai-nilai ini bisa diterapkan secara fleksibel sesuai dengan kondisi dan permasalahannya. Pengecualian dalam pelaksanaan norma non intervensi dan *ASEAN Way* dapat diterapkan dalam situasi yang kritis, ketika stabilitas dan keamanan wilayah dalam bahaya. Tetapi harus tetap berdasarkan prinsip dasar untuk menolak penggunaan kekerasan (*force*).

Keenam, agar fungsi dan efektifitas organisasi ASEAN menjadi maksimal mestinya ASEAN bisa berfungsi tidak hanya sebagai institusi yang mengelola konflik (*Conflict Management*), tapi juga meningkatkan kapabilitasnya sebagai organisasi yang mampu menyelesaikan konflik (*Conflict Resolution*). *Scope* aktor dan mekanisme dalam penyelesaian konflik seyogyanya diperluas. Tidak hanya melibatkan *first track diplomacy* tapi juga *second track* and *third track diplomacy*.

Ketujuh, ASEAN seharusnya mengurangi ketergantungan *imajenya* pada *performance* individu negara. Sebagai organisasi yang semakin terintegrasi, ASEAN harusnya dapat menciptakan identitas sebagai suatu bentuk organisasi antar negara yang terinstitusionalisasi dan *strong overlapping*, menggantikan *tradisional intergovernmentalis* yang sempit.

DAFTAR PUSTAKA

- Alagappa, Muthiah. (1995), *Regionalism and Conflict Management : a Framework for Analysis*, *Review of International Studies*, 21 : h.359-387.
- Anwar, Dewi Fortuna. (1998), 'Indonesia: Domestic Priorities Define National Security' dalam Muthiah Alagappa (ed.), *Asian Security Practice*, California : Stanford University Press.
- Archarya, Amitav. (1997), 'Imagining a Security Community: Collective Identity and Conflict Resolution in Southeast Asia' dalam Adler (eds.), *Security Communities in Comparative and Historical Perspective*, Cambridge : Cambridge University Press.
- Buses, Nickels. (1999), 'Constructivism and Southeast Asian Security', *The Pacific Review*, 12(1):h. 39-60
- Chew, Lee Kim. (2002), 'A renewed interest in ASEAN' *The Jakarta Post*, 27 April 2002.
- Collins, Alan. (1999) 'Mitigating the Security Dilemma : the Asean Way', *The Pacific Review*, 11(2):h. 95-114.
- Cotton, James. (1999), ASEAN and the Southeast Asian 'Haze': Challenging the Prevailing Models of Regional Engagement, *Working Papers*. Dep. of International Relations. RSPAS. ANU, Canberra, No.3.
- Dewiit, David. (1994) 'Common, Comprehensive and Cooperative Security', *Pacific Review*, 11 (2):h. 95-114.
- Dokken, Karin. (2001), 'Environment, Security and Regionalism in the Asia -Pacific: is environmental security a useful concept?' *The Pacific Review* 14(4) : h. 509-530.
- Eng, Peter. (1999), 'Transforming ASEAN', *The Washington Quarterly*, Winter, 22(1):h.49-65.
- Henderson, Jeannie. (1999), 'Reassessing ASEAN', *Adelphi Papers*, 328:h. 1-85.
- Hernandez, Carolina G. (1995), ASEAN Perspectives on Human Rights and Democracy in International Relations': Divergences, Commonalities, Problems and Prospects, *Publication Quezon City:CSSP*, University of the Philippines, h. 1-30.
- Huxley, Tim (1990), 'ASEAN security co-operation - past, present and future', dalam Alison Bronowski (ed.) *ASEAN into the 1990s*, London : Macmillan, h. 85-95.
- Hiebert, Murray. (1997), 'Conflict of Interest', *Far Eastern Economic Review*, 24 July. h. 18.

Jobs, Brian L. (1997), Norms of Multilateralism in the Regional Security : The Evolving Order of the Asia Pacific, *Institute of International Relations University of British Columbia*, Vancouver, Canada.

Jogerson-Dahl, Arnfinn. (1982), *Regional Organization and Order in Southeast Asia*, London: Macmillan.

Krasner, Stephen D. (1982), 'Regions as Intervening Variables', *International Organization*, 336 (2):h. 299-324.

Krause, Keith. (1999), 'Cross-Cultural Dimensions of Multilateral a Non proliferation and Arms Control dialogue : An Overview', dalam *Cross-Cultural Dimensions of Multilateral Non - proliferation and Arma Control Dialogues*, Ottawa: DFAIT, h.1-18.

Leifer, Michael, (1998), 'The ASEAN Regional Forum. A Model for Cooperative Security in the Middle East', *Working Paper 1*. Dep. of International Relations. RSPAS, ANU, Canberra.

Lintner, Bertil. (1999), Growing Pains: Human Rights Issue on Obstruct the New ASEAN's Ties with the West', *Far Eastern Economic Review*, 28 Januari.

Lederach, John Paul, (1998), *Building Peace : Sustainable Reconciliation in Divided Societies*, Washington DC: United States Institute of Peace Press.

Mahbubani, Kishore. (1995), 'The Pacific Impulse', *Survival*, 37(1):h. 105-120

Mattli, Walter. (1999), *The Logic of Regional Integration : Europe and Beyond*, Cambridge : Cambridge University Press.

Narine, Shaun (1999), ASEAN into the twenty-first century : problems and prospects, *The Pacific Review*, 12(3):h.357-380.

Naya, Seiji F. (2001), 'Asian Recovery from Economic Crisis and the Role of Japan', *East Asian Economic Perspectives (EAEP)*, 12:h. 11-54.

Reyes, Alejandro. (1999), Days of Diplomacy of the East Timor Crisis Showed Apec's Worth and also its Limits, *Asia Week*, 24 September, h. 32-35.

Simon, Sheldon W. (1998), 'Security Prospects in Southeast Asia : Collaborative Efforts and the ASEAN Regional Forum', *The Pacific Review*, 11(2):h.295-212.

Snitwongse, Kusumo. (1995), 'Asean Security Cooperation : Searching for a Regional Order', *Pacific Review* 8(1):Pp. 950-982.

Stein, Arthur.A. (1982), 'Coordination and Collaboration: Regions in an Anarchic World, *International Organization*. 36 (2):h. 299-324.

- 1 NOV 2003



Thayer,Carlyle.A(1999), 'ASEAN disunity effect regional Security', *Asian Pacific Defense Report*. Annual Reference Edition, h.11-12.

Vatikosis,Michael., Ben Dolven, and Shaun W Crispin. (1999), 'Missing in Action', *Far Eastern Economic Review*, 30 September, h.14-16.

Wanandi, Jusuf. (1997), 'A Lesson for ASEAN'; *Far Eastern Economic Review*, 24 Juli, h.34.

Asiaweek, (1999), 'It's the Army, Stupid', 24 September.

Koran Tempo, April 2002.

The Economist. (1998), 'Indonesia awakes, South-East Asia Starts to wonder', 6 Juni. h. 27.

PERSONALIA DAN ORGANISASI

1. Kepala Proyek

- 1.1. Nama lengkap : Dra Sartika Soesilowati, M.A.
1.2. Pangkat dan Jabatan : III B/ Asisten Ahli
1.3. Tempat penelitian : FISIP Universitas Airlangga Surabaya
Jl. Airlangga 4-6, Surabaya, 60286
Telp. 031-5034015
Fax. 031-5022492
1.4. Tugas/Hubungan Kerja : Mengkoordinasi dan melakukan penelitian
1.5. Waktu yang disediakan untuk penelitian ini : 15 jam per minggu

2. Pembimbing

- 2.1. Nama Lengkap : Drs I. Basis Susilo, M.A.
2.2. Pangkat dan Jabatan : IV A/ Lektor
2.3. Tempat penelitian : FISIP Universitas Airlangga Surabaya
Jl. Airlangga 4-6, Surabaya, 60286
Telp. 031-5034015
Fax. 031-5022492
2.4. Tugas/Hubungan Kerja : Melakukan bimbingan
2.5. Waktu yang disediakan untuk penelitian ini : 2 jam per minggu